

TAJUK RENCANA

Ekonomi Lokal Pariwisata Hijau

IBARAT dalam sepakbola, desawisata di Kulonprogo berhasil melakukan quattrick. 4 kali berturut-turut masuk dalam jajaran 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Tahun 2024 ini desa wisata Jatimulyo, menjadi pilihan sebagai desa wisata yang menerapkan wisata hijau.

Menparekras Sandiaga Uno ketika berkunjung ke desa tersebut, menyebut Jatimulyo memprediksi desa wisata tersebut akan jadi magnet wisatawan asing, karena punya potensi yang menarik. Apalagi lokasinya di Kulonprogo, dekat dengan Yogyakarta International Airport (YIA) (KR 22/7).

Menparekras meyakini bahwa transformasi pariwisata Indonesia menuju pariwisata hijau akan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Indonesia memiliki potensi wisata alam yang sangat besar, dengan lebih dari 17.000 pulau dan kekayaan alam yang melimpah. Pemerintah Indonesia telah memperkuat upaya untuk mempromosikan pariwisata alam sebagai sumber pendapatan utama, yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan dari sektor pariwisata di masa depan.

Di era industri 4.0 seperti sekarang ini pembangunan dalam aspek perekonomian semakin dikembangkan, pemerintah semakin gencar mendorong perekonomian nasional khususnya dalam bidang pariwisata yang ada di desa.

Beberapa destinasi wisata di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti Taman Nasional Baluran dan Taman Nasional Ujung Kulon termasuk desa wisata di Kulonprogo tersebut. Destinasi-destinasi ini mengutamakan konservasi alam, kesejahteraan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya, yang menunjukkan potensi pariwisata hijau untuk berkembang.

Masa depan pariwisata hijau di Indonesia sangat berpeluang untuk berkembang dan membuka lebih banyak kesempatan kerja berkualitas.

Pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat memiliki dampak merusak terhadap lingkungan, seperti merusak ekosistem lokal dan meningkatkan polusi udara dan sampah.

Beberapa daerah pariwisata di Indonesia mengalami pembangunan

yang berlebihan, menghabiskan kasawan alam yang berharga dan mengabaikan warisan budaya dan kearifan lokal.

Pariwisata yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan penyimpangan budaya, seperti komersialisasi budaya dan peniruan yang salah, ketika pengunjung yang tidak menghargai adat dan tradisi lokal membanjiri kawasan wisata. Upaya untuk Meningkatkan Pariwisata Hijau, diperlukan antara lain dalam penggunaan teknologi hijau. Pendekatan hijau dalam pariwisata berkelanjutan melibatkan penggunaan sumber daya yang hemat energi, ramah lingkungan, dan terbarukan, seperti hotel yang menggunakan energi surya dan panel tenaga surya.

Pemberdayaan komunitas lokal adalah kunci pariwisata berkelanjutan. Ketika masyarakat setempat terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, mereka dapat merasakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan mempertahankan warisan budaya mereka.

Peran edukasi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan, termasuk melalui program-program pendidikan tentang keberlanjutan dalam pariwisata.

Dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada, Indonesia berpeluang untuk mengembangkan pariwisata hijau yang berkelanjutan, membuka lebih banyak peluang kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya.

Pariwisata hijau dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui berbagai cara, termasuk peningkatan pendapatan, peluang kerja, dan investasi, serta melalui pendekatan yang berkelanjutan yang mempertahankan lingkungan dan masyarakat lokal.

Melalui wisatawan yang peduli terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Wisawatan ini cenderung menghabiskan lebih banyak uang di daerah tempat mereka berwisata, yang dapat meningkatkan pendapatan lokal.

Pariwisata hijau membuka peluang kerja baru di sektor-sektor seperti ekowisata, agrowisata, dan pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. Ini termasuk pekerjaan di bidang konservasi, pertanian organik, dan pengelolaan lingkungan. (**)-d

Pudarnya Etika Politik

Hamdan Daulay

SUNGGUH menarik pendapat Prof Ahmad Syafii Ma'arif (alm) dalam buku Etika Politik (2015: 66) tentang realitas elite politik yang cenderung dengan budaya bohong dan korup. Kebohongan dan budaya korup terjadi karena hilangnya rasa malu. Ketika elite politik tidak lagi memiliki rasa malu, nilai etika pun kian pudar. Orientasi yang ada dalam pikiran mereka hanya kekuasaan. Ketika rasa malu sudah tidak ada, kekuasaan pun diraih dan dipertahankan dengan menghalalkan segala cara. Dalam kondisi seperti ini, mata dan telinga mereka pun seolah ibutai dan ituli, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan berbagai kritik yang muncul di tengah masyarakat.

Elite politik dalam mempertahankan jabatan politik, begitu lihai memainkan retorika politik dengan berbagai cara yang serba *apologis* untuk membela diri. Banyak pilihan kata yang dipakai elite politik dalam rangka pembelaan diri, agar mereka seolah kelihatan bersih dan membela kepentingan rakyat. Retorika politik dengan model *eufemisme* dalam upaya membela diri sudah biasa dilakukan elite politik. Ada politisi yang mengatakan, tidak ada dinasti politik, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, ikorupsi adalah musuh bersama atau imari kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun tragisnya, banyak pejabat yang begitu semangat menyampaikan retorika antikorupsi, justru ditangkap KPK karena kasus korupsi.

Retorika politik yang penuh kebohongan, menurut Deliar Noor (2003: 127), membuat etika politik tercerabut dari akarnya. Artinya begitu sulit mendapatkan nilai kejujuran dari ucapan dan tindakan elite politik. Mereka cenderung memakai bahasa *eufemisme* yang penuh kepura-puraan, dengan berbagai topeng kepalsuan. Setiap kata yang mereka ucapkan tidak lagi dipikirkan nilai kejujurannya, dan bagaimana efeknya bagi masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, mereka menutup mata dan telinga dari berbagai kritik yang disampaikan masyarakat yang jujur. Justru mereka mabuk dengan puja puji dari penjilat politik menyesatkan dengan memberi informasi yang penuh kepalsuan.

Retorika Politik

Kalau dikaitkan dengan teori komunikasi, dalam komunikasi politik se-

orang politisi harus bisa memahami dengan baik bagaimana pesan yang jujur harus disampaikan, dan bagaimana efek pesan tersebut bagi masyarakat. Jangan sampai karena retorika yang penuh kebohongan, membuat citra diri kian terpuruk. Dampak berikutnya, akan memin-



KR-JOKO SANTOSO

bulkan kebencian dan kemarahan masyarakat.

Tokoh politik yang baik seharusnya mampu memilih pesan yang komunikatif (dengan mengutamakan kejujuran) walau dirasakan pahit mengucapkannya. Sebab kata-kata yang jujur dari seorang tokoh/pemimpin justru sangat dihargai masyarakat. Pemimpin yang jujur mau mengakui kesalahannya, lebih dihormati dibanding dengan tokoh yang penuh retorika kebohongan dan topeng-topeng kepalsuan.

Budaya bohong dalam komunikasi politik menjadi kian sulit dihindari saat perilaku tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. Cara pandang masyarakat yang menganggap biasa kebohongan elite politik membuat semakin subur praktik politik kebohongan dan kepalsuan. Ketika kebohongan sudah dianggap hal biasa, sangat sulit menegakkan kejujuran. Bahkan kalau muncul tokoh politik yang jujur akan dianggap aneh dan dijadikan musuh bersama. Dalam kondisi seperti ini sulit diharapkan *civil society* mampu melakukan kontrol sosial secara maksimal kepada rezim

penguasa.

Dilihat dari aspek komunikator (aktor politik), Ramlan Surbakti (2007:132) menjelaskan ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik. Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti keadaan keluarga, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Perilaku aktor politik saat ini tidak bisa lepas dari empat faktor tersebut, sehingga tokoh politik yang muncul belum tentu lahir dari mereka yang lebih berkualitas. Apalagi dari aspek lingkungan dan sistem politik yang muncul dengan maraknya kebohongan politik, membuat kian sulit menemukan tokoh politik yang jujur. Padahal keju-

juran politik harus bisa diaktualisasikan dengan satunya kata dan tindakan. Kualitas seorang tokoh politik bukanlah pada kehebatannya bermain retorika, melainkan pada nilai kejujuran pada setiap kata yang diucapkan. Semakin jujur seorang politisi, semakin dihormati. Sebaliknya semakin banyak kebohongan politisi akan dibenci dan dicerca oleh masyarakat. (*)-d

***)Dr Hamdan Daulay MSi MA,**
Ketua Program Magister KPI UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSoN, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanryk23@yahoo.com, iklanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) .. Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Koperasi dan Demokrasi Ekonomi

Tan-Sri Zulfikar Yusuf

BULAN Juli ini para pembaca ibarat panen berita dan artikel mengenai koperasi. Kita tahu, kita punya Bung Hatta yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Akan saya coba menyampaikannya.

Bung Hatta sangat gigit mengangurkan masyarakat Indonesia untuk berkoperasi. Dari sejarahnya, Bung Hatta terkas akan sistem ekonomi dan perkembangan koperasi di Skandinavia yang beliau kunjungi dan pelajari pada tahun 1926 saat masih belajar di Negeri Belanda.

Adalah Nitisumantri, Ketua SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) yang mengusulkan agar Bung Hatta dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi I di Tasikmalaya 1947, antara lain mengingat pula bahwa Bung Hatta adalah tokoh yang merumuskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai paham idemokrasi ekonomii. Menurut Des Alwi, Bung Hatta sudah mulai mempersiapkan rumusan Pasal 33 sejak di pemuangan Boven Digoel.

Mengingat situasi keamanan tanah air saat itu sedang genting, Bung Hatta tidak bisa hadir ke Tasikmalaya, maka SOKRI menunda pemberian gelar kepada Bung Hatta sampai Kongres Koperasi II berikutnya di Tasikmalaya, 15 Juli 1952.

Barangkali penting untuk mengetahui siapa itu Nitisumantri yang lahir di Garut 1901 dan dikenal sebagai tokoh pejuang sejak zaman kolonial. Ia sempat dibuang ke Boven Digoel (1927-1931) tempat pemuangan kolonial yang paling mengerikan. Sedang Bung Hatta (dan Bung Sjahrir dkk) dibuang ke Boven Digoel tahun 1934 karena perjuangan gigihnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia.

Barangkali banyak yang belum menyadari bahwa perkataan ikoperasi hanya disebut 1 kali saja dalam UUD 1945 (asli) pada Penjelasan. Perkataan ikoperasi tidak ada sama sekali pada UUD 2002 hasil amandemen. Tentulah gerakan koperasi Indonesia berkecil hati, bahwa koperasi bukan lagi merupakan pesan konstitusional dalam UUD 2002.

Pasal 33 UUD 1945 asli ketiga ayatnya tidak diubah, tidak diamandemen sama sekali, berarti makna dan dimensinya secara substansial tetap, tidak berubah. Dengan demikian itu tetap berlaku keseluruhan makna Penjelasan dari Pasal 33 UUD 1945 asli sepenuhnya, sedang UUD 2002 hasil amandemen tidak memiliki Penjelasan sama sekali untuk pasal-pasal dan ayat-ayatnya.

Prof Maria Farida Indrati (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi) menulis di Mimbar Hukum, Jur nal Berkala FH-UGM, No. 49/II/2005: iOnamun bagi pasal-pasal yang belum diubah, tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan pasal-pasalnya.

Dengan kata lain perkataan ibangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah ikoperasi tidak hilang dari UUD 2002 dan makna koperasi sebagai wujud idemokrasi ekonomii; bahwa ikemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang; bahwa ihanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang (swasta); bahwa ibumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; maka keseluruhan kalimat tersebut tetap berlaku pada UUD 2002.

Pandangan Prof Maria itu secara rasional mendapat dukungan sepenuhnya dari para tokoh koperasi Indonesia, termasuk mantan Ketua Dewan Koperasi Indonesia, Sri Edi Swasono.

Koperasi menolak sistem ekonomi kapitalisme yang mendasarkan pada liberalisme dan persaingan-bebas. Koperasi mendasarkan pada kerjasama, mengutamakan

kebersamaan, saling dukung-mendukung, saling melengkapi dan saling bergotong-royong antara para anggotanya. Lalu ditingkatkan secara nasional, sistem kerjasama koperasi meliputi ketiga wadah ekonomi: Koperasi Swasta dan BUMN, sebagai sistem demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, Indonesia memiliki sistem ekonomi nasional berdasar tiga landasan pokok: (1). Bangun perusahaan yang sesuai dengan tuntutan konstitusi adalah koperasi; (2). Sistem ekonomi Indonesia berdasar idemokrasi ekonomii (Penjelasan Pasal 33 yang tidak pernah diamandemen), yang menolak kapitalisme, liberalisme dan persaingan-bebas; (3). Pemerintahan negara turun tangan, menata, mengatur jalannya perekonomian ke arah kebersamaan. Hal ini dapat diartikan Pemerintah tidak boleh membiarkan perekonomian nasional tersusun sendiri semauanya mengikuti selera pasar-bebas kapitalistik.

Koperasi tidak akan maju selama negara memelihara kapitalisme dan liberalisme. Pemerintah wajib *cawÉ-cawÉ* untuk memajukan koperasi.

Bung Hatta merumuskan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebagai paham idemokrasi ekonomii. Barangkali Bung Hatta patut disebut pula sebagai iBapak Demokrasi Ekonomii. (*)-d

***)Tan-Sri Zulfikar Yusuf, pakar per-**
koperasian.

Pojok KR

Penambangan ilegal Gunungkidul ditutup.
-- Lokasi lain menyusul?.

KPK diminta usut 'mark up' impor beras.
-- Masih saja tidak pernah jera.

Ratusan hektar ladang pertanian Gunungkidul kekeringan.
-- Masalah rutin yang perlu solusi saat kemarau.

Berita